

LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2019

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

JAKARTA, 2019

KATA PENGANTAR

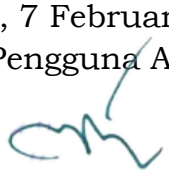
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Februari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Indriaty Tubagus, Apt

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	7
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI.	Lampiran dan Daftar	53

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560
TELEPON 021 4244819, 4207683, 4244691 FAXIMILE 021 4244819

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Februari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Indriaty Tubagus, Apt

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp180.022.342 atau mencapai 0.64 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp28.000.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp40.978.054.946 atau mencapai 90.71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp41.096.377.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.378.776.315 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp14.768.570. Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.610.239.954. dan Aset Lainnya (neto) sebesar 753.767.791. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp5.378.776.315

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp1.500.000. sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp41.121.842.761 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp41.121.842.761). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.045.997.951 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp42.166.340.712)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp5.486.654.076 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.42.166.340.712) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp40.864.882.051 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp5.378.776.315.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	28.000.000.000	180.022.342	0,64	10.290.563
JUMLAH PENDAPATAN		**28.000.000.000**	**180.022.342**	**0,64**	**10.290.563**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0,00	-
Belanja Barang	B.2.2	39.063.847.000	38.951.994.542	99,71	42.410.826.235
Belanja Modal	B.2.3	2.032.530.000	2.026.060.404	99,68	2.319.913.405
JUMLAH BELANJA		**41.096.377.000**	**40.978.054.946**	**99,71**	**44.730.739.640**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Dibendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	14.768.570	140.792.517
Jumlah Aset Lancar		14.768.570	140.792.517
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.3	13.339.503.843	14.015.451.526
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.4	32.450.000	32.450.000
Aset Tetap Lainnya	C.5	1.457.008.326	1.457.008.326
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(10.218.722.215)	(10.962.036.293)
Jumlah Aset Tetap		4.610.239.954	4.542.873.559
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	5.036.720.805	4.350.112.805
Aset Lain-Lain	C.8	-	1.195.230.900
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(4.282.953.014)	(4.742.355.705)
Jumlah Aset Lainnya		753.767.791	802.988.000
JUMLAH ASET		**5.378.776.315**	**5.486.654.076**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.10	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	5.378.776.315	5.486.654.076
JUMLAH EKUITAS		5.378.776.315	5.486.654.076
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**5.378.776.315**	**5.486.654.076**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.500.000	653.564
JUMLAH PENDAPATAN		**1.500.000**	**653.564**
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	405.551.272	482.258.975
Beban Barang dan Jasa	D.3	14.455.927.309	19.098.794.691
Beban Pemeliharaan	D.4	43.612.106	19.000.000
Beban Perjalanan Dinas	D.5	24.175.092.642	23.045.220.199
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	2.041.659.432	1.908.979.785
JUMLAH BEBAN		**41.121.842.761**	44.554.253.650
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(41.120.342.761)**	**(44.553.600.086)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.7		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		178.522.342	8.999.999
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		(1.226.685.133)	(135.910.025)
Defisit Selisih Kurs			-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.045.220	4.057.955
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(880.380)	(1.990.661)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.045.997.951)	(124.842.732)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(42.166.340.712)**	**(44.678.442.818)**
POS LUAR BIASA	D.8		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(42.166.340.712)**	**(44.678.442.818)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1	**5.486.654.076**	**5.219.703.370**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	**(42.166.340.712)**	**(44.678.442.818)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	**1.193.580.900**	**28.976.367**
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	1.193.580.900	28.976.367
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	**40.864.882.051**	**44.916.417.157**
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	E.4.1	40.978.054.946	44.730.739.640
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	E.4.2	-180.022.342	-10.290.563
TRANSFER KELUAR	E.4.3	0	-5.460.000
TRANSFER MASUK	E.4.4	66.849.447	201.428.080
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.5	**107.877.761**	**266.950.706**
EKUITAS AKHIR	E.6	**5.378.776.315**	**5.486.654.076**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengawasi peredaran obat tradisional, produk komplemen dan kosmetika. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2017. Entitas berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, 10560.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. Melalui peran tersebut diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berkomitmen dengan visi "*Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.*" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komlemen dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan pendapatan-LO, pada Badan POM adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan pendapatan berdasarkan kas yang diterima adalah pendapatan diakui pada saat penerimaan kas, yang berlaku pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), penjualan baku pembanding dan hewan percobaan.
b. Pengakuan pendapatan berdasarkan hak adalah pendapatan diakui pada saat Badan POM telah memberikan jasa layanan/barang. Pengakuan pendapatan berdasarkan hak berlaku pada layanan jasa berikut:
    1) Pendaftaran notifikasi kosmetik / pembaharuan / variasi;
    2) evaluasi Persetujuan Protokol Uji Bioekivalensi (PPUB);
    3) evaluasi permohonan persetujuan uji klinik obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan;
    4) pendaftaran pra registrasi obat tradisional dan suplemen ma-kanan;

5) pendaftaran registrasi produk baru/daftar ulang/variasi obat tradisional dan suplemen makanan;
6) pendaftaran dan evaluasi pangan olahan;
7) pendaftaran iklan dan evaluasi iklan obat tradisonal, suplemen makanan dan iklan obat;
8) jasa inspeksi sarana produksi impor, yaitu
   a. evaluasi dokumen pra inspeksi sarana produksi;
   b. audit sarana produksi;
   c. evaluasi dokumen hasil inspeksi luar negeri.
9) pengujian;
10) kalibrasi;
11) pelatihan laboratorium;
12) uji profisiensi;
13) pembelian hewan uji dan baku pembanding.

c. Pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan pekerjaan dan termin adalah pendapatan yang diakui sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan termin. Pengakuan berdasarkan kemajuan pekerjaan atau termin sesuai dengan bisnis proses masing-masing jasa layanan yaitu sebagai berikut:
   1) Pendapatan jasa/layanan Pendaftaran dan Evaluasi Obat dan Produk Biologi :
      a. pendapatan diakui sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari tarif apabila

berkas/data pra registrasi yang telah memenuhi persyaratan telah diterima olah Badan POM, dengan output berupa tanda terima berkas yang telah diberi nomor ID

b. pendapatan diakui sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari tarif apabila berkas/data telah dievaluasi oleh evaluator dan dibahas oleh KOMNAS, dengan output berupa hasil evaluasi;

c. pendapatan diakui sebesar 100 (seratus) persen apabila jasa/layanan telah diterima oleh pengguna layanan yaitu berupa:
   - hasil pra registrasi; atau
   - persetujuan nomor izin edar; atau
   - persetujuan (approvable letter); atau
   - persetujuan impor dalam bentuk ruahan; atau
   - persetujuan impor khusus ekspor; atau
   - persetujuan khusus ekspor; atau
   - persetujuan registrasi variasi berupa persetujuan izin edar atau surat persetujuan perubahan yang merupakan addendum dari persetujuan izin edar yang telah diterbitkan.
   - penolakan.

2) Pendapatan layanan jasa Inspeksi sarana produk impor pada evaluasi dokumen hasil inspeksi luar negeri:

- Pendapatan diakui sebesar 50 (lima puluh) persen dari tariff apabila pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi CAPA telah dilakukan oleh Badan POM, dengan output berupa hasil evaluasi;
- Pendapatan layanan jasa diakui sebesar 100 (seratus) persen dari tarif pada saat surat persetujuan/ penolakan diterbitkan.

3) Sertifikasi dan/atau Resertifikasi CDOB, CPOB, CPPOB, Sertifikasi Higiene dan Sanitasi (HS) dan Surat Persetujuan Pendaftaran Produsen Bahan Tambahan Pangan, CPOTB, CPKB dan CPBBAOB
   - Pendapatan diakui sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari tarif apabila berkas yang telah memenuhi persyaratan diterima oleh Badan POM, dengan output berupa tanda terima berkas,surat perintah bayar atau dokumen lainnya;
   - Pendapatan diakui sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari tarif apabila dalam tahap Monitoring dan Evaluasi CAPA, dengan output berupa hasil evaluasi;
   - Pendapatan diakui sebesar 100 (seratus) persen dari tarif bila:
     i. sertifikat diterbitkan berupa sertifikat CDOB, CPOB, CPPOB, Sertifikasi Higiene dan Sanitasi (HS) dan Surat Persetujuan Pendaftaran Produsen

Bahan Tambahan Pangan, CPOTB, CPKB dan CPBBAOB dan atau surat penolakan;

ii. Surat Pembatalan dari pihak ketiga.

4) Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama
   - pendapatan diakui sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari tarif apabila berkas/datayang telah memenuhi persyaratan telah diterima oleh Badan POM, dengan output berupa tanda terima berkas, surat perintah bayar atau dokumen lainnya.
   - pendapatan diakui sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari tarif apabila berkas/data telah dievaluasi oleh evaluator, dengan output berupa hasil evaluasi.
   - pendapatan diakui sebesar 100 (seratus) persen dari tarif apabila surat persetujuan/ penolakan Penggunaan fasilitas bersama (obat tradisional, kosmetik, makanan) diterbitkan.
5) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik NegarafDaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK 06/2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian. pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai

akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan . Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan .

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang

berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melakukan revisi Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Uraian	31 Desember 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	28.000.000.000	28.000.000.000
Jumlah Pendapatan	**28.000.000.000**	**28.000.000.000**
Belanja		
Belanja Barang	39.260.576.000	39.063.847.000
Belanja Modal	1.835.801.000	2.032.530.000
Jumlah Belanja	**41.096.377.000**	**41.096.377.000**

Realisasi Pendapatan Rp180.022.342

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp180.022.342,- atau mencapai 0,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp28.000.000.000. Rendahnya realisasi pendapatan dikarenakan realisasi pendapatan PNBP Fungsional dicatat oleh Satker Sekretariat Utama, sementara pendapatan yang dicatat di Satker Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdiri hanyalah pendapatan yang berasal dari Pengelolaan BMN, namun terdapat transaksi pendapatan jasa (425321) sebesar Rp1.500.000 yang disebabkan karena adanya pembayaran PNBP yang dilakukan oleh CV. Goen Goen Refleksi pada tanggal 20 Nopember 2019 dalam rangka pengajuan Sertifikasi Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang **tidak** sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saat ini sedang dilakukan proses pengembalian atas pembayaran PNBP tersebut di KPPN sesuai dengan Surat dari PT Goen Goen Refleksi No.

094/CV_GR/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Permohonan Pengembalian PNBP, Surat Keterangan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) Nomor KU.04.01.43.01.20.01 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keterangan Telah Dibukukan No. S-6995/WPB.12/KP.06/2019 tanggal 26 Desember 2019 (terlampir). Rincian Realisasi Pendapatan sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31-Dec-19		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta pendapatan dari penjualan	-	178.522.342	-
Pendapatan Jasa	28.000.000.000	1.500.000	0,01
Pendapatan Iuran dan Denda	-		-
Pendapatan Lain-lain	-		-
Jumlah	**28.000.000.000**	**180.022.342**	0,64

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 1.649.39 persen dibandingkan 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena pada 31 Desember 2019 pendapatan dari pengelolaan BMN serta pandapatan dari penjulan mengalami kenaikan sebesar 1883.58%. Pendapatan dari pengelolaan BMN serta pandapatan dari penjualan ini berasal dari pemindahantanganan BMN berupa 3 unit alat angkutan darat bermotor dengan Risalah Lelang No. 223/28/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan Pemindahantanganan Inventaris Kantor sebanyak 398 unit dengan risalah lelang No. 377/28/2019.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	178.522.342	8.999.999	1883,58
Pendapatan Jasa	1.500.000	-	100,00
Pendapatan Iuran dan Denda	-	653.564	-100,00
Pendapatan Lain-lain	-	637.000	-100,00
Jumlah	**180.022.342**	**10.290.563**	**1649,39**

Realisasi Belanja Negara Rp40.978.054.946

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40.978.054.946 atau 99.71 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 41.096.377.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	39.063.847.000	39.347.953.242	100,73
Belanja Modal	2.032.530.000	2.026.060.404	99,68
Total Belanja Kotor	**41.096.377.000**	**41.374.013.646**	100,68
Pengembalian		(395.958.700)	-
Jumlah	**41.096.377.000**	**40.978.054.946**	99,71

Dibandingkan dengan 31 Desember 2018, Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 8,39%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada belanja barang sebesar 8,16% dan pada belanja belanja modal sebesar 12,67%.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	38.951.994.542	42.410.826.235	(8,16)
Belanja Modal	2.026.060.404	2.319.913.405	(12,67)
Jumlah	**40.978.054.946**	**44.730.739.640**	**(8,39)**

Belanja Barang Rp38.951.994.542

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp38.951.994.542 dan Rp42.410.826.235. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019

mengalami penurunan sebesar 8,16 persen dari Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2018,

Perbandingan Belanja Barang

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	599.382.206	3.684.965.000	(83,73)
Belanja Barang Non Operasional	7.140.641.487	7.657.306.330	(6,75)
Belanja Barang Konsumsi	277.362.485	247.811.345	11,92
Belanja Jasa	6.717.898.116	7.759.544.412	(13,42)
Belanja Pemeliharaan	43.612.106	19.000.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	22.626.667.148	22.632.430.442	(0,03)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.942.389.694	909.244.543	
Jumlah Belanja Kotor	**39.347.953.242**	**42.910.302.072**	**(8,30)**
Pengembalian Belanja	(395.958.700)	(499.475.837)	**(20,73)**
Jumlah Belanja	**38.951.994.542**	**42.410.826.235**	**(8,16)**

Terdapat pengembalian belanja berupa:

URAIAN	31-Dec-19
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	1.994.500
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	95.308.918
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.713.908
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	132.463.709
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	113.175.520
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	27.302.145
Jumlah	**395.958.700**

Belanja Modal

Rp2.026.060.404

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp2.026.060.404 dan Rp2.319.913.405. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 12,67 persen dikarenakan adanya penurunan pagu anggaran sebesar Rp293.853.001 dibandingkan 31 Desember 2018

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	T.A. 2019	T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.336.525.704	1.686.669.600	(20,76)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2.926.700	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	221.423.000	633.243.805	(99,54)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	465.185.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**2.026.060.404**	**2.319.913.405**	(12,67)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**2.026.060.404**	**2.319.913.405**	(12,67)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.336.525.704, mengalami penurunan sebesar 20,76 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2018 sebesar Rp1.686.669.600, dikarenakan adanya penurunan pagu anggaran sebesar Rp350.143.896.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan	0	1.022.177.300	-100%
Peralatan Kantor dan Rumah	203.470.750	7.300.000	100%
Alat Studio dan Komunikasi	4.100.000	29.792.000	
Alat Laboratorium	0	0	
Komputer Unit dan Peralatan	1.128.954.954	627.400.300	100%
Jumlah Belanja Kotor	**1.336.525.704**	**1.686.669.600**	-21%
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	**1.336.525.704**	**1.686.669.600**	**-20,76**

B.5.2 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing dan Rp2.926.700 dan Rp0. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin berupa pembelian software Microsoft Office 365 di

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing dan Rp221.423.000 dan Rp633.243.805 Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 411.820.805 bila dibandingkan Realisasi 31 Desember 2018. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp221.423.000 berupa :

- Pembelian Aplikasi e-reporting efek samping Kosmetik senilai Rp121.423.000 pada Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Pengembangan Aplikasi SiREKA senilai Rp100.000.000 pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

B.5.4 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing dan Rp465.185.000 dan Rp0. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya berupa Pengembangan Aplikasi Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Aplikasi SiREKA dan Notifikasi Kosmetik di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan Rp14.768.570

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp14.768.570,- dan Rp 140.792.517,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31-Dec-19	31-Dec-18
Barang Konsumsi	14,768,570	140,792,517
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya		-
Jumlah	**14,768,570**	**140,792,517**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan Mesin Rp13.339.503.843

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp13.339.503.843 dan Rp14.015.451.526. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**14,015,451,526**
Mutasi tambah:	**1,487,551,521**
Pembelian	1,336,525,704
Pengembangan Nilai	2,926,700
Transfer Masuk	148,099,117
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	**2,163,499,204**
Penghentian Aset dari Penggunaan	2,163,499,204
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	
Saldo per 31 Desember 2019	**13,339,503,843**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-10,186,272,215
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**3,153,231,628**

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp1.487.551.521, berupa:

- Pembelian :
  - Alat kantor sebanyak 2 unit sebesar Rp13.475.000
  - Alat Rumah Tangga sebanyak 46 unit sebesar Rp189.995.750
  - Alat Studio sebanyak 2 unit sebesar Rp4.100.000
  - Komputer Unit sebanyak 58 unit sebesar Rp838.777.545
  - Peralatan Komputer sebanyak 42 unit sebesar Rp290.177.409
- Pengembangan nilai asset sebesar Rp2.926.700 berupa pembelian software Microsoft Office 365 sebanyak 2 unit
- Transfer masuk berupa :
  - alat khusus kepolisian sebanyak 2 unit sebesar Rp87.599.117 dengan nomer BAST PR.07.06.81.814.04.19.2010 tanggal 25 April 2019

- alat rumah tangga sebanyak 22 unit sebesar Rp60.500.000 dengan nomer BAST PL.03.07.321.10.19.4271 tanggal 22 Oktober 2019

Mutasi kurang peralatan dan mesin senilai Rp2.163.499.204 berupa:

- Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp2.163.499.204 berupa :
  - Alat angkutan bermotor sebanyak 3 unit senilai Rp494.521.000
  - Alat kantor sebanyak 47 buah senilai Rp295.509.102
  - Alat rumah tangga sebanyak 148 buah senilai Rp253.034.226
  - Alat studio sebanyak 18 buah senilai Rp124.352.195
  - Alat komunikasi sebanyak 6 buah senilai Rp10.930.000
  - Peralatan komunikasi navigasi sebanyak 1 buah senilai Rp3.785.000
  - Unit alat laboratorium sebanyak 1 buah senilai Rp15.950.000
  - Komputer unit sebanyak 50 buah senilai Rp661.969.893
  - Peralatan komputer sebanyak 95 buah senilai Rp303.447.788

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp32.450.000

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.450.000 dan Rp32.450.000. Mutasi transaksi

terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**32,450,000**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	**32,450,000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(32,450,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**-**

Tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang atas saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2019.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp1.457.008.326

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah Rp1.457.008.326. Aset tetap tersebut berupa monografi, buku pustaka, *mikrofisch* dan audio visual lainnya. Mutasi transaksi aset tetap lainnya pada tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**1,457,008,326**
Mutasi tambah:	**0**
Reklasifikasi masuk	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian Aset	0
Saldo per 31 Desember 2019	**1,457,008,326**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**1,457,008,326**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp10.218.722.215)

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar (Rp10.218.722.215) dan (Rp10.962.036.293) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13,339,503,843	-10,186,272,215	3,153,231,628
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32,450,000	-32,450,000	0
3	Aset Tetap Lainnya	1,457,008,326	0	1,457,008,326
Akumulasi Penyusutan		**14,828,962,169**	**-10,218,722,215**	**4,610,239,954**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp5.036.720.805

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp5.036.720.805 dan Rp4.350.112.805.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi

terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**4,350,112,805**
Mutasi tambah:	**686,608,000**
Pembelian	121,423,000
Pengembangan Nilai Aset	565,185,000
Koreksi Pencatatan	-
Mutasi kurang:	**-**
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Koreksi pencatatan nilai	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2019	**5,036,720,805**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(4,282,953,014)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**753,767,791**

Mutasi tambah aset tak berwujud sebesar Rp686.608.000,- berupa:

- **Pengembangan** aplikasi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan senilai Rp235.900.000, berupa aplikasi Mobile E-Reporting Efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Aplikasi Tindak Lanjut Pengawasan OT dan SK dan Database Monitoring Surat.
- **Pengembangan** aplikasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik senilai Rp329.285.000 berupa pengembangan aplikasi Sireka dan Aplikasi Notifikasi Kosmetik yang berfungsi sebagai perijinan pendaftaran iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Notifikasi Kosmetik
- **Pembelian** aplikasi e-reporting efek samping kosmetik senilai Rp121.423.000 pada Direktorat Pengawasan Kosmetik

Tidak terdapat mutasi kurang pada aset tak berwujud pada 31 Desember 2019.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2019

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	4,667,670,805
Hasil Kajian / Penelitian	369,050,000
Jumlah	**5,036,720,805**

Aset Yak Berwujud Hasil Kajian / Penelitian berupa Hasil Kajian penelitian pada produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

C.8 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp1.195.230.900. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	**1.195.230.900**
Mutasi tambah:	**2.163.499.204**
- reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	2.163.499.204
- reklasifikasi dari aset tetap (Aset Tak berwujud)	-
Mutasi kurang:	**3.358.730.104**
- penghapusan BMN	3.358.730.104
Saldo per 31 Desember 2019	**-**
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**-**

- Terdapat transaksi penambahan berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya karena Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp2.163.499.204 yang terdiri dari :

- Alat angkutan bermotor sebanyak 3 unit senilai Rp494.521.000
- Alat kantor sebanyak 47 buah senilai Rp295.509.102
- Alat rumah tangga sebanyak 148 buah senilai Rp253.034.226
- Alat studio sebanyak 18 buah senilai Rp124.352.195
- Alat komunikasi sebanyak 6 buah senilai Rp10.930.000
- Peralatan komunikasi navigasi sebanyak 1 buah senilai Rp3.785.000
- Unit alat laboratorium sebanyak 1 buah senilai Rp15.950.000
- Komputer unit sebanyak 50 buah senilai Rp661.969.893
- Peralatan komputer sebanyak 95 buah senilai Rp303.447.788

- Terdapat transaksi pengurangan berupa Penghapusan BMN senilai Rp3.358.730.104 yang terdiri dari :
  - Alat angkutan bermotor sebanyak 3 unit senilai Rp494.521.000
  - Alat kantor sebanyak 47 buah senilai Rp295.509.102
  - Alat rumah tangga sebanyak 148 buah senilai Rp253.034.226
  - Alat studio sebanyak 18 buah senilai Rp124.352.195
  - Alat komunikasi sebanyak 6 buah senilai Rp10.930.000

- Peralatan komunikasi navigasi sebanyak 1 buah senilai Rp3.785.000
- Unit alat laboratorium sebanyak 1 buah senilai Rp15.950.000
- Komputer unit sebanyak 50 buah senilai Rp661.969.893
- Peralatan komputer sebanyak 95 buah senilai Rp305.097.788
- Aset Tak Berwujud sebanyak 3 aset senilai Rp1.193.580.900

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Rp4.282.953.014)

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing dan (Rp4.282.953.014) dan (Rp4.742.355.705). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	4.667.670.805	-4.282.953.014	384.717.791
Hasil Kajian / Penelitian	369.050.000	0	369.050.000
Jumlah	**5.036.720.805**	**-4.282.953.014**	**753.767.791**
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**5.036.720.805**	**-4.282.953.014**	**753.767.791**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.10 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp0

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.11 Ekuitas

Ekuitas
Rp5.378.776.315

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp5.378.776.315 dan Rp5.486.654.076. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP

Rp1.500.000

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.500.000 dan Rp653.564. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya diperoleh karena adanya pembayaran PNBP yang dilakukan oleh CV. Goen Goen Refleksi pada tanggal 20 Nopember 2019 dalam rangka pengajuan Sertifikasi Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saat ini sedang dilakukan proses pengembalian atas pembayaran PNBP tersebut di KPPN sesuai dengan Surat dari PT Goen Goen Refleksi No. 094/CV_GR/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Permohonan Pengembalian PNBP, Surat Keterangan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) Nomor KU.04.01.43.01.20.01 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keterangan Telah Dibukukan No. S-6995/WPB.12/KP.06/2019 tanggal 26 Desember 2019 (terlampir)

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan lainnya	1.500.000	653.564	-56%
Jumlah	**1.500.000**	**653.564**	-56%

Beban Persediaan

Rp405.551.272

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp405.551.272 dan Rp482.258.975. Beban Persediaan

merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	405.551.272	482.258.975	-15,91
Jumlah	**405.551.272**	**482.258.975**	**-15,91**

Beban Barang dan Jasa Rp14.455.927.309

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp14.455.927.309 dan Rp19.098.794.691. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desemberhun 2019 dan *31 Desember 2018* adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	517.590.812	2.756.486.250	(81,22)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.682.380	51.404.300	(87,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.545.755	11.616.000	68,27
Beban Honor Operasional Satker	14.400.000	795.618.250	(98,19)
Beban Barang Operasional Lainnya	39.168.759	66.857.000	(41,41)
Beban Bahan	6.065.707.087	6.682.774.080	(9,23)
Beban Honor Output Kegiatan	286.510.000	409.030.000	(29,95)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	788.424.400	565.502.250	39,42
Beban Jasa Konsultan	98.450.000	99.324.500	(0,88)
Beban Sewa	508.479.227	558.097.793	(8,89)
Beban Jasa Profesi	3.929.657.000	3.155.451.000	24,54
Beban Jasa Lainnya	2.181.311.889	3.946.633.268	(44,73)
Jumlah	**14.455.927.309**	**19.098.794.691**	(24,31)

Beban Pemeliharaan

Rp43.612.106

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp43.612.106 dan Rp19.000.000 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.612.106	19.000.000	129,54
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	**43.612.106**	**19.000.000**	129,54

Beban Perjalanan Dinas

Rp24.175.092.642

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp24.175.092.642 dan Rp23.045.220.199 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi. dan pengawasan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	6.223.296.007	6.006.328.814	3,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	752.552.500	756.594.800	-0,53
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.417.033.642	7.831.279.101	-5,29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.980.298.464	7.582.480.697	**5,25**
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.040.682.983	430.884.108	**141,52**
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	761.229.046	437.652.679	**73,93**
Jumlah	**24.175.092.642**	**23.045.220.199**	**4,90**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.041.659.432

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp2.041.659.432 dan Rp1.908.979.785. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2018	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.306.037.473	1.136.210.611	14,95
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah Penyusutan	**1.306.037.473**	**1.136.210.611**	**14,95**
Beban Amortisasi Software	735.415.709	767.656.222	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	206.250	5.112.952	(95,97)
Jumlah Amortisasi	**735.621.959**	**772.769.174**	**(4,81)**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**2.041.659.432**	**1.908.979.785**	**6,95**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional (Rp1.045.997.951)

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**178.522.342**	**8.999.999**	1883,58%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	178.522.342	8.999.999	1883,58%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	**-1.226.685.133**	**-135.910.025**	802,57%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-1.226.685.133	-135.910.025	802,57%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**-1.048.162.791**	**-126.910.026**	725,91%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**3.045.220**	**4.057.955**	-24,96%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	637.000	-100,00%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.045.220	3.420.955	-10,98%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**-880.380**	**-1.990.661**	-55,77%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-880.380	-1.990.661	-55,77%
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non	**2.164.840**	**2.067.294**	4,72%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-1.045.997.951**	**-124.842.732**	737,85%

Pendapatan pelepasan asset non lancar berupa pendapatan dari pemindahtangan BMN Lainnya sebesar Rp178.522.342, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	No. Risalah Lelang &Tanggal	Nilai
Alat Angkutan Darat Bermotor	No. 223/28/2019 17 Juli 2019	167.632.577
Alat Pengolah Data dan Inventaris Kantor	No. 377/28/2019 20 November 2019	10.889.765
Jumlah		**178.522.342**

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp Rp5.486.654.076

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.486.654.076 dan Rp5.219.703.370.

Defisit LO (Rp42.166.340.712)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp42.166.340.712) dan (Rp44.678.442.818). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Atas Reklasifikasi

Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi aset. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan. Jembatan, dan Bangunan Air.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Rp1.193.580.900

E.3.4 Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.193.580.900 dan Rp28.976.367. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset Lainnya	1.193.580.900
Jumlah	**1.193.580.900**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp40.864.882.051

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp40.864.882.051 dan Rp44.916.417.157. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	40.978.054.946
Diterima dari Entitas Lain	(180.022.342)
Transfer Masuk	66.849.447
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**40.864.882.051**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019. DDEL sebesar Rp(180.022.342) sedangkan DKEL sebesar Rp40.978.054.946

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA -BUN.

Terdapat transfer masuk sebesar Rp148.099.117 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp81.249.670) berupa alat khusus kepolisian (Barcode Reader) sebanyak 2 unit dan Alat Rumah Tangga sebanyak 22 unit. sehingga nilai transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp66.849.447 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Entitas Tujuan	No. BAST &Tanggal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Pusdatin	PR.07.06.81.814.12.18.5744 25 April 2019	87.599.117
Alat Rumah Tangga	Deputi I	PL.03.07.321.10.19.4271 22 Oktober 2019	60.500.000
Akumulasi Penyusutan			(81.249.670)
Jumlah			**66.849.447**

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas. barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat hibah yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp5.378.776.315

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp5.378.776.315 dan Rp5.486.654.076.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN	
			Nilai Buku Administrasi	Nilai Wajar
1	Tanah	-	0	0
2	Gedung dan Bangunan	-	0	0
3	JJBA	-	0	0
	Total	**-**	**0**	**0**

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan;
2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN; dan
3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 0 NUP dengan total nilai kenaikan/penurunan nilai BMN sebesar Rp0 yang berasal dari nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp0 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp0

Rincian rekapitulasi hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN		Kenaikan/ Penurunan
			Nilai Wajar Sebelum Perbaikan	Nilai Wajar Setelah Perbaikan	
1	Tanah	-	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	-	0	0	0
3	JJBA	-	0	0	0
	Total	**-**	**0**	**0**	**0**

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019
* Beban Amortisasi

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 30-12-2019	Beban Peny. Per 31-12-2019	Akm. Peny. Per 31-12-2019	Nilai Buku Per 31-12-2019
A	**Peralatan dan Mesin**						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	2.260.544.795	1.484.958.730	214.862.542	1.205.300.272	**1.055.244.523**
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7	4.386.000	4.386.000	-	4.386.000	**-**
3	Alat Pengolahan	5	1.732.962	1.083.101	433.241	1.516.342	**216.620**
4	Alat Kantor	5	1.133.082.604	1.217.803.391	73.454.580	1.013.576.298	**119.506.306**
5	Alat Rumah Tangga	5	1.677.020.890	1.392.432.551	163.913.584	1.355.443.909	**321.576.981**
6	Alat Studio	5	205.963.707	267.084.569	24.055.393	169.760.367	**36.203.340**
7	Alat Komunikasi	5	33.203.500	37.852.450	2.076.700	29.399.150	**3.804.350**
8	Peralatan Komunikasi Navigasi	5	5.490.000	1.855.000	492.167	1.463.999	**4.026.001**
9	Unit Alat Laboratorium	5	4.164.000	16.730.750	520.500	1.301.250	**2.862.750**
10	Alat Khusus Kepolisian	5	87.599.117	-	21.899.779	54.749.449	**32.849.668**
11	Komputer Unit	4	6.014.493.678	4.988.312.148	585.909.054	4.912.251.309	**1.102.242.369**
12	Peralatan Komputer	4	1.911.822.590	1.517.087.603	218.419.933	1.437.123.870	**474.698.720**
13	Alat SAR	3	-	-	-	-	**-**
	Jumlah		**13.339.503.843**	**10.929.586.293**	**1.306.037.473**	**10.186.272.215**	**3.153.231.628**
B	**Jaringan**						
1	Instalasi Lain	20	32.450.000	32.450.000	-	32.450.000	**-**
	Jumlah		**32.450.000**	**32.450.000**	**-**	**32.450.000**	**-**
C	**Aset Tetap Lainnya**						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	20	976.215.326	-	-	-	**976.215.326**
2	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	20	480.793.000	-	-	-	**480.793.000**
3	Barang bercorak kesenian	20	0	-	-	-	**-**
	Jumlah		**1.457.008.326**	**0**	**0**	**0**	**1.457.008.326**
D	**Aset Tak BerWujud**						
1	Software Komputer	5	4.667.670.805	3.547.537.305	735.415.709	4.282.953.014	**384.717.791**
2	Hasil Kajian/Penelitian	5	369.050.000	-	-	-	**369.050.000**
	Jumlah		**5.036.720.805**	**3.547.537.305**	**735.415.709**	**4.282.953.014**	**753.767.791**
E	**Aset Lain-lain**						
1	Alat Kantor	5	0	-	-	-	**-**
2	Alat Rumah Tangga	5	0	-	-	-	**-**
3	Alat Studio	5	0	-	-	-	**-**
4	Komputer Unit	4	0	-	-	-	**-**
5	Peralatan Komputer	4	0	1.237.500	206.250	-	**-**
6	Software Komputer	5	0	1.193.580.900	-	-	**-**
	Jumlah		**-**	**1.194.818.400**	**206.250**	**-**	**-**